

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Reformasi manajemen keuangan daerah di Indonesia ditandai dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dengan tujuan pelaksanaan otonomi daerah tersebut secara umum adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah, memperbaiki transparansi dan akuntabilitas publikatas pengelolaan keungan daerah, meningkatkan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan publik, meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan daerah, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan dan pelayanan publik serta mendorong demokratisasi di daerah (Mahmudi,2010).

Perkembangan pengetahuan masyarakat tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di daerah saat ini menyebabkan tantangan bagi pemerintah untuk lebih meningkatkan pengelolaan keuangan di daerah agar lebih transparan dalam membuat suatu laporan keuangan daerah. Upaya transparansi ini bisa dilakukan melalui pelaksanaan akuntansi dan pembuatan laporan keuangan. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka informasi laporan keungan juga harus dipublikasikan agar masyarakat selaku stakeholdermengetahui dan bisa melakukan analisa yang diperlukan dalam rangka mengevaluasi kinerja (Mahmudi,2010). Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan

akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Transparansi dan akuntabilitas merupakan elemen yang berbeda namun merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Untuk mewujudkan akuntabilitas diperlukan transparansi. Jika akuntabilitas keuangan daerah tidak disertai dengan transparansi maka keuangan daerah tersebut bisa jadi sebuah manipulasi dan masyarakat tidak mendapatkan informasi yang semestinya di dapatkan. Namun pada era sekarang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan masih belum optimal (Hehanussa, 2015). Cara yang ditempuh untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan adalah dengan mengharuskan pemerintah untuk menyusun suatu laporan keuangan yang dilakukan dengan melaksanakan kegiatan akuntansi keuangan daerah. Agar transparansi dan akuntabilitas dapat terjamin, diperlukannya suatu sistem akuntansi yang baik, dan sistem tersebut dijalankan melalui Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD). Sistem akuntansi keuangan daerah bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah serta memudahkan pengendalian yang efektif atas seluruh asset, hutang, dan ekuitas dana.

Salah satu prasyarat untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan, yakni pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan yang relevan secara jujur dan terbuka kepada publik, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat. Penelitian yang menguji pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah, memperoleh bukti empiris bahwa penyajian laporan keuangan yang lengkap dan secara langsung tersedia serta aksesibilitas bagi pengguna informasi menentukan sejauh mana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tersebut (Mulyana, 2006; Hehanussa, 2015).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Ende Propinsi Nusa Tenggara Timur”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka perumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

- 1)Apakah penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah?
- 2)Apakah aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah?

3)Apakah penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh secara simultan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah?

1.3 Batasan Masalah

1. Untuk Penyajian laporan keuangan daerah diukur menggunakan instrumen kuesioner yang menggunakan 4 indikator yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami (PP No. 71 Tahun 2010).
2. Untuk Aksesibilitas laporan keuangan diukur menggunakan kuesioner yang menggunakan indikator yaitu data terbuka yang dapat diketahui, diakses dan diperoleh oleh masyarakat. (UU No.33 Tahun 2004)
3. Untuk Transparansi dan Akuntabilitas diukur menggunakan kuesioner yang menggunakan indikator yaitu data terbuka yang dapat diketahui, diakses dan diperoleh oleh masyarakat. (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2003)
4. Periode tahun 2016-2020
5. Responden dalam penelitian ini adalah para staf atau pegawai PEMDA Kabupaten Ende.

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- 1) Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah memiliki terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

- 2) Pengaruh aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
- 3) Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah secara simultan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi:

- 1) Mahasiswa Jurusan Akuntansi, penelitian ini bermanfaat untuk perkembangan ilmu akuntansi dan untuk menambah pengetahuan mengenai akuntansi pemerintahan daerah.
- 2) Peneliti berikutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melaksanakan penelitian mengenai topik yang sama.
- 3) Bagi pemerintah daerah Kabupaten Ende, penelitian ini diharapkan menjadi referensi dalam hal penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan dalam rangka peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan daerah.

1.6 Kerangka Penulisan Skripsi

Dalam skripsi ini terdiri dari lima bab yang akan dijelaskan oleh penulis yaitu :

Bab I Pendahuluan

Bab ini terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan kerangka penulisan skripsi.

Bab II Landasan Teori

Bab ini berisi tentang teori-teori yang terkait dengan penelitian, uraian penelitian terdahulu tentang hasil-hasil penelitian, dan hipotesis dalam landasan teori.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang metode penelitian yaitu menjelaskan tentang langkah-langkah sistematis dalam melakukan penelitian yaitu, ruang lingkup penelitian, populasi dan sampel, jenis data dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisa data.

Bab IV Analisis Dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang hasil dari penelitian yaitu berupa pembahasan dan gambaran umum penelitian, analisis data yang berupa tabel, serta pembahasan yang mengarah pada kesimpulan.

Bab V Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang merupakan hasil pembahasan yang singkat pada penelitian dan akan menjawab rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini, memberikan saran pada penelitian berdasarkan pada kesimpulan yang ada, serta keterbatasan pada penelitian.

BAB II